

Mardiyono) Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.....

**KAMPUNG KB SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT/KELUARGA DI JAWA TIMUR.
(Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Bondowoso)**

**KAMPUNG KB FOR COMMUNITY/FAMILY EMPOWERMENT EFFORTS
IN EAST JAVA.
(Study in Malang and Bondowoso)**

Mardiyono

Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur
mardiyonolisa@yahoo.co.id

Diterima : 26 Mei 2017; direvisi : 17 November 2017 ; disetujui : 30 November 2017

ABSTRAK

Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga di wilayah pinggiran terhadap pengelolaan program KB atau program lainnya yang sesuai dengan permasalahan di wilayah tersebut. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, sebagai tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri agar bisa lebih mandiri dalam pengelolaan program. Dengan metode pendekatan penelitian kualitatif dilakukan studi dengan menerapkan tahapan penelitian operasional dalam rangka untuk mengevaluasi intervensi keberhasilan program Kampung KB di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program terkait lainnya guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Adapun hasil penelitian adalah keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat diberbagai tingkatan, perlu intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi dan penggerakan dari SKPDKB dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa masyarakat itu sendiri bukan semata program pemerintah. Peran Bupati/Walikota sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Diperlukan pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan "Skill" pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB.

Kata kunci: Kampung KB, Pemberdayaan Keluarga

ABSTRACT

Kampung KB is designed as an effort to empower the community/family in the periphery to the management of family planning programs or other programs that are appropriate to the problems in the region. Its activities are managed on the basis of the principle of, by, and for society itself, as the ultimate goal of course the development of society itself. The government only stimulates and mentoring, the rest is the responsibility of the community itself to be more independent in the management of the program. With qualitative research approach method, the study is conducted by applying the operational research stages in order to evaluate the intervention of the success of Kampung KB program in Malang and Bondowoso. The purpose of this research is to improve the achievement of KKBPK program and other related programs in order to create quality small family. The results of the research is the success of the village is determined by the active role of the community in various levels, the need for program intervention, funds, facilities, infrastructure, IEC, advocacy and mobilization of SKPDKB and cross-sector with the target of collective and sustainable cultural movement, regarded as community

initiative itself is not merely a government program. The role of the Regent / Mayor is very important with the Pokja Kampung KB Kabupaten / Kota team by involving the DPRD members sitting together to schedule the intervention program in the village of KB as well as to maintain the continuity of the program. Required assistance for KKBPK program implementation in field line and "Skill" training in other UPPKS and Poktan groups as well as provision of APBD funds in support of advocacy, IEC and mobilization in the kampung area of KB.

Keywords: Kampung KB, Family Empowerment

PENDAHULUAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Lembaga Non Kementerian yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas ke-3 "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan", Agenda Prioritas ke-5 "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" serta Agenda Prioritas ke-8 "Revolusi Karakter Bangsa" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Nasional) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Sejalan dengan langkah strategis ke depan BKKBN memiliki tanggung jawab untuk lebih berperan aktif pada 1) penguatan pemahaman fungsi-fungsi keluarga terutama dalam hal penguatan mental dan karakter seluruh anggota keluarga, 2) pembinaan anak usia dini melalui Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif agar terbentuk karakter anak sejak usia dini, 3) pembinaan bagi keluarga yang memiliki remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan Generasi Berencana atau GenRe, dan 4) pembinaan melalui keluarga yang memiliki lansia, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan UPPKS, serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Isu pertambahan jumlah penduduk saat ini sudah mulai menjadi topik sentral dalam

menetapkan segala aspek dalam perencanaan program pembangunan di Pemerintah Daerah dari level kabupaten/kota hingga provinsi. Salah satu faktor stagnerannya program KKBPK di Indonesia dewasa ini ditandai dengan Angka Fertilitas Total (TFR) dalam periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Berdasarkan data tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49% atau 4,5 juta jiwa per tahun atau setara dengan jumlah penduduk di Singapura. Pemerintah menargetkan pertumbuhan populasi dapat ditekan menjadi 1,1%.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada saat ini sudah mulai menurun dan gaungnya tidak terdengar seperti dulu lagi, sehingga harus direvitalisasi kembali serta diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan program KKBPK tersebut.

Lini lapangan (*below the line*) menjadi tema sentral pembangunan program Kependudukan, Keluarga berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejak 2010-an. Sejumlah kegiatan monumental digulirkan. Pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat digalakkan. Kampung KB termasuk salah satu terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program KKBPK di tingkat dusun alias kampung.

Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Kampung KB merupakan salah satu upaya menjadikan program KKB-PK sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Selanjutnya dalam majalah Majalah Warta Kencana Edisi 12 Tahun IV/April 2013

halaman 8-9, Bupati Sukabumi Sukmawijaya menegaskan bahwa penduduk merupakan hal yang amat sangat sentral dalam pembangunan. Upaya pembangunan di bidang lain, sebesar apapun, sehebat apapun, tanpa dibarengi dengan pengendalian penduduk akan sia-sia. Karena itu, pengendalian penduduk adalah sebuah keniscayaan.

Begitu juga hasil penelitian dari Irfan Nasrulloh dr, Hakay dkk tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Siaga di Desa Kilensari Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan panduan desa siaga, namun masih belum ada inovasi program yang dicanangkan berdasarkan permasalahan kesehatan riil di desa.

Konsep Pemberdayaan Keluarga/Masyarakat.

Pemberdayaan keluarga/ masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat maupun keluarga yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat maupun keluarga. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada keluarga/masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan keluarga/masyarakat terhadap usaha kesejahteraan keluarga maupun masyarakat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup keluarga/masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia/ masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

maupun masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran serta aktif keluarga atau masyarakat dalam segala bentuk meningkatkan kesejahteraan (Notoatmodjo, 2005).

Konsep Kampung KB

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program KB secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Yakni melalui upaya menjadikan kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan studi ini menggunakan metode evaluatif dengan rancangan deskriptif melakukan eksplorasi dalam rangka untuk mengevaluasi keberhasilan Kampung KB melalui tahapan Penelitian Operasional yang terdiri dari tahap identifikasi, intervensi, monitoring, evaluasi. Adapun informan SPKD KB Tingkat I Provinsi dan Kabupaten, lintas sektoral ; Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, serta tokoh agama, tokoh masyarakat (RT/RW), kader, petugas KB (bidan, PLKB/PKB) serta lurah/kepala desa, BPD. Cara pengumpulan data : Wawancara

mendalam dengan instrumen pedoman wawancara dan FGD keluarga yang sudah KB maupun yang belum KB dan poktan BKB, BKR, BKL, PIK/R/M dan UPPKS

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi

Sumber Rujukan dan Implementasi Kebijakan untuk pengembangan kampung KB di BKKBN Pusat adalah merujuk Surat Edaran Mendagri No.440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia ; Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016, Perihal Siaran Langsung Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia.

Sedangkan di Jawa Timur sebagai sumber rujukan adalah Surat Gubernur Jawa Timur No. 440/4675/031/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal tentang Peningkatan Koordinasi Program KKBPK dan Kesehatan di Jawa Timur, kemudian pada tanggal 28 April 2017 dengan surat keputusan Gubernur nomor 188/236/KPTS/013/2017 tentang Kelompok Kerja Integrasi program pembangunan lintas sector dalam kampung KB Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan surat tersebut selanjutnya Walikota Malang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/192/35.73.112/ tahun 2017 tentang Kelompok Kerja kampung KB kota Malang bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keluarga yang sehat dan sejahtera di kota Malang. Adapun di Kabupaten Bondowoso sebagai sumber rujukan untuk pengembangan kampung KB yaitu SK Bupati Bondowoso Nomor : 18845 / 976 / 430.6.2 /Tahun 2015, perihal tentang Kelompok Kerja kampung KB Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan yang telah dilakukan di Perwakilan BKKBN Jawa Timur berkaitan pengembangan kampung KB adalah : (1). Sosialisasi Program KKBPK dan Pembentukan Kampung KB seharusnya diadakan pada tanggal 25 November 2015 di rubah tanggalnya menjadi 2 Desember 2015 di Ruang Rumatama Polda Jatim di dengan sasaran SKPD KB se Jatim. (2). Konsolidasi program Pembangunan Keluarga di Kampung KB diadakan pada tanggal 29 s/d 30 Nopember 2015 di Padjajaran Suite Resort & Coventional Hotel Bogor di hadiri Kepala SKPD

se Jawa Timur.(3). Pelaksanaan Pembentukan Kampung KB pada tanggal 3 Desember 2015 di Poltekes Kemenkes Surabaya, sasaran Kepala bidang KB, Kepala Desa dan PKB wilayah Kampung KB. (4). Pencanaan Kampung KB dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 di dusun Lowok Pepen, Desa Mojosari kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kegiatan berkaitan dengan pengembangan kampung KB dilakukan di Kota Malang adalah : (1). Sosialisasi Kampung KB di tingkat Kabupaten diadakan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan sasaran sektor terkait. (2). Sosialisasi Kampung KB di tingkat Kecamatan diadakan pada tanggal 23 Desember 2015 sasaran sektor terkait di tingkat kecamatan, Kades/Lurah, Toga/ Toma. (3). Sosialisasi Kampung KB di tingkat Desa dipadukan dengan Rakor Desa di masing-masing wilayah. (4). Pembinaan Khusus wilayah Kampung KB menjadi prioritas kegiatan program KKBPK seperti pembinaan ketahanan keluarga, KIE Kelompok, pelayanan KB dll. (5). Pencanaan kampung KB di kota Malang dilakukan oleh Walikota Malang abah Anton pada tanggal 14 April 2016 di Kelurahan Kotalama RW 8.

Kegiatan berkaitan dengan pengembangan kampung KB yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso : (1). Sosialisasi Kampung KB di tingkat Kabupaten diadakan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan sasaran sektor terkait. (2). Sosialisasi kampung KB di tingkat Kecamatan diadakan pada tanggal 28 Januari 2016 sasaran sektor terkait di tingkat kecamatan, Koramil, Puskesmas, Kades/Lurah, Toga/Toma. (3). Sosialisasi Kampung KB di tingkat Desa dipadukan dengan Rakor Desa di masing-masing wilayah. (4). Pembinaan Khusus wilayah Kampung KB menjadi prioritas kegaitan program KKBPK seperti pembinaan ketahanan keluarga, KIE Kelompok, pelayanan KB. (5). Pencanaan Kampung KB dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016 di Desa Lemprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.

Tahap Intervensi

Dari hasil identifikasi penelitian setelah perencanaan kampung KB sudah dilakukan intervensi baik yang dilakukan oleh SKPD KB sendiri maupun yang dilakukan oleh lintas sektoral di wilayah kampung KB, diantara

intervensi yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Kampung KB di RW 08, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tempat pencaangan kampung KB intervensi yang telah dilakukan : (1). Sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK. (2). Staf meeting tematik kampung KB dengan kader PPKBD dan sub PPKBD yang dilaksanakan setiap bulan. (3). Rakor di Balai Kelurahan yang dihadiri oleh kader PPKBD/Sub PPKBD setiap 2 bulan sekali. (4). Peningkatan pelayanan KB khususnya KB MKJP. (5). Pembentukan kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS "Nusa Indah". (6). Pelatihan Tehnis Pengelola Kampung KB. (7). Dinas pertanian telah melakukan penyuluhan secara rutin kepada warga di RW 08 tentang pembuatan sabun dari daun sirih, juga diajarkan pembuatan telur asin, sambel pecel dan minyak goreng dan hasilnya bekerjasama dengan dinas perdagangan dipasarkan lewat pameran (8). Dinas Perhubungan kota Malang juga telah memberikan papan petunjuk arah "kampung KB" agar lebih dikenal (9). Dinas Pertamanan kota Malang memberikan bibit tanaman Lombok sebanyak 100 biji diberikan kepada warga RW 08 untuk meningkatkan kelangkaan tanaman Lombok
- b. Kampung KB dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, tempat pencaangan kampung KB intervensi yang telah dilakukan yaitu : (1). Sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK. (2). Staf meeting dengan kader PPKBD dan sub PPKBD yang dilaksanakan setiap bulan. (3). Rakordes di Balai Desa Leprak yang dihadiri oleh kader PPKBD/Sub PPKBD setiap 2 bulan sekali. (4) Melakukan pelayanan KB khususnya untuk meningkatkan pencapaian KB MKJP. (5). Sosialisasi perlindungan anak dengan narasumber Kepala dan Kepala bidang PP & KB Kabupaten Bondowoso tgl 12 April 2016. (6). Pembentukan Forum Anak Desa leprak sebagai komitmen dari Bupati dengan DPR menuju Bondowoso layak anak. (7). Pembentukan kelompok BKB "Sedap Malam", BKR "Cinta Kasih", BKL "Rajawali", dan UPPKS "Matahari" (8). Pelatihan Tehnis Pengelola Kampung KB (bulan Pebruari tahun 2016). (9). Sosialisasi dan pembentukan

PIK/R "Tunas Harapan" di Balai Desa Leprak tgl 27 Juni 2016 dalam rangka temu Genre

Tahap Monitoring

Dalam tahap monitoring ini untuk melihat keberhasilan wilayah kampung KB yang telah di intervensi oleh SKPD KB maupun lintas sektoral apakah ada peningkatan apa tidak. Ada 3 indikator untuk monitoring yaitu menilai keberhasilan input, keberhasilan proses dan keberhasilan out put.

Apabila dilihat di wilayah **kampung KB RW 8, Kelurahan Kotalama, Kota Malang** dari sisi **keberhasilan input** yaitu jumlah PLKB/PKB masih belum proporsional, namun setelah adanya kampung KB ini seluruh PLKB/PKB bahu membahu untuk mensukseskan program KKBPK di wilayah tersebut dan dibantu kader yang begitu antusias untuk mensakseskannya, dan sudah banyak kunjungan dari propinsi lain dan juga dibuat praktek pelatihan kampung KB dari Balai Diklat Malang, dari dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain masih kecil dan belum berfokus ke wilayah kampung KB. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, Jamkesda, jamkesmas, maupun sarana pendukung lainnya di wilayah kampung KB ini tidak ada masalah letaknya dekat dengan Pustu maupun Puskesmas.

Jika dilihat dari indikator **keberhasilan proses**, maka terdapat peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE yang dulu PKB/PLKB jarang berkunjung di wilayah kampung KB RW 8 Kelurahan Kotalama Kota Malang, setelah wilayahnya terpilih menjadi kampung KB menjadi sering berkunjung, juga membentuk kelompok kegiatan baru yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS "Nusa Indah" diadakan pertemuan secara berkala setiap sebulan sekali, serta pelayanan posyandu untuk meningkatkan pelayanan KB.

Jika dilihat indikator **keberhasilan Out put** ternyata ada perubahan baik peserta KB Baru, peserta aktif maupun KB MKJP, pertemuan kelompok kegiatan yang telah dibentuk sudah berjalan dan dilakukan secara berkala. Juga dari program lintas sektoral telah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan dari keluarga RW 8.

Begitu juga bila dilihat di wilayah **kampung KB dusun Parseh, Desa Leprak,**

Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dari sisi **keberhasilan input** yaitu jumlah PLKB/PKB masih belum proporsional 1 dibanding 5, sama dengan di Kota Malang setelah adanya kampung KB ini seluruh PLKB/PKB menjadi satu walaupun bukan wilayahnya ikut mensukseskan program KKBPK di wilayah kampung KB tersebut dan dibantu oleh kader yang begitu antusias untuk mensakseskannya. Anggaran operasional kelurahan dari APBD sekitar Rp 400 juta, PNPM mandiri Rp. 3.640.00,-, dana dari ADD untuk honor kader PPKBD sebesar Rp. 25 ribu dan kader Sub PPKBD sebesar Rp. 22,5 ribu, dana yang fokus ke wilayah kampung KB belum ada. Untuk ketersediaan alat dan obat kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya di wilayah kampung KB ini memang dulu ada masalah karena letak jauh dan terpencil, tapi sekarang setelah ada kampung KB ini bisa diatasi dengan menempatkan bidan di wilayah itu.

Apabila dilihat dari indikator **keberhasilan proses**, maka terdapat peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE yang dulu PKB/PLKB jarang berkunjung di wilayah kampung KB Dusun Parseh, Desa Leprak, setelah wilayahnya terpilih menjadi kampung KB menjadi sering berkunjung, juga bisa membentuk kelompok kegiatan baru yaitu BKB "Sedap Malam", BKR "Cinta Kasih", BKL "Rajawali", UPPKS "Matahari" dan PIK/R "Tunas Harapan" serta pelayanan posyandu untuk meningkatkan pelayanan KB.

Selanjutnya jika dilihat dari **indikator keberhasilan Out put** di wilayah kampung KB Dusun Parseh, Desa Leprak Kabupaten Bondowoso ternyata ada perubahan baik peserta KB Baru, peserta aktif maupun KB MKJP naik MOP 1 akseptor dan IUD 13 akseptor, pertemuan kelompok kegiatan yang telah dibentuk belum dilakukan secara berkala, karena keterbatasan dana. Juga dari program lintas sektoral akan memberikan jamban di wilayah kampung KB tersebut.

Analisis SWOT dan Kebijakan

Setelah diidentifikasi dan dilihat dari sisi intervensi yang telah dilakukan Perwakilan BKKBN Jawa Timur maupun SKPD KB Kabupaten/Kota, maka kita akan menganalisis SWOT apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan

kampung KB.

Adapun yang menjadi **Strengt (kekuatan)** untuk mengembangkan kampung KB baik di Kota Malang maupun Bondowoso adalah adanya PLKB di Kampung KB tersebut, karena tanpa dukungan dari PLKB mustahil untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program terkait di wilayah kampung KB. Kemudian tersedianya dukungan dana (APBN & APBD) untuk wilayah kampung KB, karena tanpa dukungan dana kegiatan kampung KB tidak akan berjalan sesuai harapan. Juga adanya Pengelola Kampung KB yang diterbitkan melalui SK Bupati/Walikota.

Sedangkan yang menjadi **Weaknesses (kelemahan)** adalah jumlah PLKB sangat terbatas, juga di wilayah kampung KB itu sulit mencari kader karena SDM sangat rendah sekali, serta keterbatasan sarana, prasarana dan dana operasional di wilayah tersebut.

Apabila dilihat dari **Opportunities (peluang)** di wilayah kampung KB tersebut adalah adanya dukungan politis dari Walikota Malang maupun Bupati Bondowoso, dibuktikan dengan pencanangan "Kampung KB" tersebut oleh Walikota/Bupati sendiri. Kemudian dukungan seluruh instansi Dinas dan lintas sektoral untuk intervensi wilayah kampung KB serta dukungan pers terhadap kampung KB, sehingga seluruh kegiatan di kampung KB masyarakat semua mengetahui.

Jika dianalisis dari sisi **Threath (tantangan)** maka dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah kampung KB sebagian besar warganya kurang mampu, SDM rendah, budaya kawin muda dan lemahnya advokasi pengelola program kepada pemerintah daerah.

Sedangkan apabila dianalisis dari kebijakan bahwa kampung KB ini sangat strategis, karena didukung oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan sampai di tingkat desa, RT, RW dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakatpun sangat antusias menyambutnya.

Ada 5 (lima) yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan program KKBPK dan program lainnya di kampung KB diantaranya (a). Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan). (b). Integritas program KKBPK dan integritas lintas sektor. (c).

Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra/stakeholder. (d). Semangat dan dedikasi para pengelola program KKBPK di lini lapangan (PKB, IMP) (e). Partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan untuk kampung KB sudah didukung mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan sampai ke tingkat RW/RT.
2. Jumlah PLKB/PKB masih belum proporsional, namun setelah adanya kampung KB ini seluruh PLKB/PKB bahu membahu untuk mensukseskan program KKBPK di wilayah tersebut dan dibantu kader yang begitu antusias untuk mensaksesskannya.
3. Terdapat peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi KIE dan penggerakan, dulu PKB/PLKB jarang berkunjung di wilayah kampung KB setelah wilayahnya terpilih menjadi kampung KB menjadi sering berkunjung, juga membentuk kelompok kegiatan baru dan pertemuannya sudah secara berkala, serta pelayanan posyandu untuk meningkatkan pelayanan KB.
4. Ada perubahan baik peserta KB Baru terutama KB MKJP maupun program terkait lainnya. Keberhasilan program KKBPK dan program terkait lainnya di wilayah kampung KB sangat ditentukan pula oleh peran aktif

masyarakat itu sendiri dari berbagai tingkatan dan perlu KIE sebagai target akhir yaitu gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap prakarsa publik bukan semata program pemerintah.

Saran

1. Peran Bupati/Walikota sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB dan Lintas Sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas koperasi dan Lintas Sektor lainnya), juga melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan Kampung KB serta merencanakan program pembangunan jangka panjang & menengah untuk menjaga kesinambungan program.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi baik di tingkat internal SKPD KB bersama dengan bidang terkait untuk melakukan intervensi dalam mendukung kampung KB.
3. Perlu pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan wilayah Kampung KB dengan leading sektor Badan PP & KB bersama Lintas Sektor terkait lain.
4. Perlu pelatihan "*Skill*" pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya di wilayah kampung KB.
5. Perlu penyediaan dana APBD (ADD) dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB.

Daftar Pustaka:

- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2015. Petunjuk Tehnis Kampung KB.
- Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 3 ayat (a) & (b)
- Emil : Sosialisasi KB di Gakin Masih Kurang. Situs Resmi, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2010
- Notoatmodjo, "Dimensi Pemberdayaan Masyarakat", Tahun 2005
- Pedoman Penggerakan Program kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Model Kampung KKB Sukabumi Tahun 2013
- Perwakilan BKKBN Jatim, 2015. Juknis Pengelolaan Kampung KB di Jawa Timur
- Prijono dan Pranarka, "Pemberdayaan Masyarakat", Tahun 1996
- Kampung KKB wujud Konkret *People Centered Devolepment*, Majalah Warta Kencana Edisi 12 halaman 8-9 Tahun IV / April 2013.
- Soenardi Sabrur R. Program KB dan Masa Depan Bangsa. 2009
- Sosialisasi Kampung KB dan Kreteria Pemilihan Kampung KB di Jawa Timur, Nopember 2015
- Wabside, 2014. Kampung KB sebagai *Best Practice* Pelaksana Program Terpadu Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.